



IMAMAH:

Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Volume 4, Number 1, Juni 2026 | E-ISSN: 3026-572X
<https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/imamah>

Analisis Peran Kepemimpinan Sekolah dalam Mengembangkan Kebijakan Penanaman Nilai Pendidikan Islam Moderat di UPT SMPN 22 Gresik

Mely Qurrota A'yunil Haq

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, Jawa Timur, Indonesia

Maftuh

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, Jawa Timur, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ melyqurrota@gmail.com

Keywords:

Islamic Religious Education, Moderate Islam, School Principal

Kata Kunci:

Pendidikan Agama Islam, Islam Moderat, Kepala Sekolah



[doi:https://doi.org/10.65311/jmpi.v4i1.1874](https://doi.org/10.65311/jmpi.v4i1.1874)

Abstract

Schools play a pivotal role as educational institutions in instilling the values of moderate Islamic education within pluralistic societies to prevent extremism and promote tolerance. A key determinant in achieving this objective is school leadership. This study examines the role of school leadership at UPT SMPN 22 Gresik using a descriptive qualitative approach involving the principal, teachers, and students as research subjects. The findings reveal that school leadership holds a strategic role in formulating and implementing policies through their integration into the Islamic Religious Education curriculum, Christian religious education, and Civics (PPKn). The internalization of values such as tawassuth (moderation), tasamuh (tolerance), tawazun (balance), and i'tidal (justice), carried out through instructional processes and social interactions, has been shown to contribute significantly to the development of students' character, fostering tolerance, empathy, and a sense of justice, as well as promoting a harmonious school environment.

Abstrak

Sekolah berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam moderat di tengah keberagaman untuk mencegah ekstremisme dan mendorong toleransi. Salah satu kunci yang berperan dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah kepemimpinan sekolah. Penelitian ini mengkaji peran kepemimpinan sekolah di UPT SMPN 22 Gresik dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah berperan strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan melalui integrasi dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, pendidikan keagamaan Nasrani, dan PPKN. Penanaman nilai tawassuth, tasamuh, tawazun, dan i'tidal melalui pembelajaran dan interaksi sosial terbukti membentuk karakter peserta didik yang toleran, empatik, dan adil, serta menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan keberagaman suku, budaya, ras, dan agama yang berlandaskan pada prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila (Kemendikbud, 2003). Prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar ideologis negara, tetapi juga sebagai landasan normatif dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban. Nilai ketuhanan yang terkandung di dalamnya mengandung konsekuensi logis berupa tuntutan untuk menjunjung tinggi sikap toleransi, saling menghormati, serta pengakuan terhadap perbedaan sebagai realitas sosial yang tidak dapat dihindari (Azra, 2019). Dalam konteks ini, pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai sarana internalisasi nilai-nilai tersebut melalui proses pembelajaran yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter (*character building*) yang mampu membentuk peserta didik menjadi individu yang berakhlak mulia, demokratis, dan mampu hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman (Tilaar, 2012). Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa praktik intoleransi masih ditemukan dalam lingkungan pendidikan, baik dalam bentuk pemaksaan atribut keagamaan, perundungan berbasis identitas, maupun diskriminasi dalam berbagai aktivitas sekolah (Maarif, 2018). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal yang diharapkan dengan praktik nyata di lapangan. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai pendidikan Islam moderat menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, mengingat pendidikan Islam moderat menekankan prinsip keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i’tidal*), toleransi (*tasamuh*), serta sikap tengah (*wasathiyah*) dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama (Zuhairi, 2016). Nilai-nilai tersebut diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik yang inklusif, adaptif, serta memiliki kesadaran sosial yang tinggi dalam merespons dinamika keberagaman di era globalisasi.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran sentral dan strategis dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam moderat melalui berbagai aspek, mulai dari pengembangan kurikulum, pembentukan budaya sekolah, hingga pelaksanaan proses pembelajaran yang dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan karakter (Muhaimin, 2015). Lingkungan sekolah tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya proses akademik, tetapi juga menjadi ruang sosial bagi peserta didik untuk mempraktikkan nilai-nilai toleransi, kerja sama, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kepemimpinan sekolah menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi nilai-nilai tersebut. Pemimpin sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai agen perubahan (*change agent*) yang mampu merumuskan kebijakan, mengarahkan visi kelembagaan, serta menciptakan iklim sekolah yang kondusif dan harmonis (Lickona, 2013). Kepemimpinan yang efektif dan transformatif akan mampu mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan. Di UPT SMPN 22 Gresik, penerapan nilai-nilai pendidikan Islam moderat telah menunjukkan kontribusi positif terhadap pembentukan karakter peserta didik yang toleran, disiplin, dan berakhlak (Banks, 2016). Hal ini tercermin dari berbagai program dan kebijakan sekolah yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keberagaman. Meskipun demikian, peran kepemimpinan sekolah dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan terkait pendidikan Islam moderat masih memerlukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis peran kepemimpinan sekolah dalam mengembangkan kebijakan penanaman nilai-nilai pendidikan Islam moderat guna mendukung terciptanya generasi yang toleran, berkarakter, serta mampu hidup secara harmonis dalam masyarakat yang plural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran kepemimpinan sekolah dalam mengembangkan kebijakan penanaman nilai pendidikan Islam moderat di UPT SMPN 22 Gresik. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dilaksanakan pada periode 28 Mei hingga 10 Juni 2024. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder yang dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan uji kredibilitas seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, serta penggunaan bahan referensi, dan uji transferabilitas agar hasil penelitian dapat dipahami serta berpotensi diterapkan pada konteks lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran kepemimpinan sekolah dalam mengembangkan kebijakan penanaman nilai pendidikan Islam moderat merupakan aspek yang sangat krusial dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadaban, dan responsif terhadap dinamika keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam konteks pendidikan modern, sekolah tidak lagi dipandang semata sebagai institusi akademik yang berfokus pada pencapaian kognitif, melainkan sebagai ruang strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang berkontribusi terhadap pembentukan karakter peserta didik secara holistik (Tilaar, 2012). Pendidikan Islam moderat, yang menekankan prinsip *tawassuth* (moderasi), *tawazun* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (keadilan), menjadi landasan penting dalam membangun sikap keberagaman yang inklusif, kontekstual, dan tidak ekstrem di tengah masyarakat yang plural (Azra, 2019). Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam membentuk pola pikir dan perilaku peserta didik agar mampu menghargai perbedaan serta menghindari sikap eksklusivisme. Namun demikian, tanpa adanya kebijakan yang terarah, sistematis, dan didukung oleh kepemimpinan yang efektif, potensi munculnya sikap intoleransi, diskriminasi, hingga radikalisme di lingkungan pendidikan tetap terbuka. Oleh karena itu, analisis terhadap peran kepemimpinan sekolah menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan penanaman nilai pendidikan Islam moderat dirumuskan, diimplementasikan, serta dievaluasi secara komprehensif dalam konteks kelembagaan pendidikan.

Kepemimpinan sekolah, khususnya kepala sekolah, memiliki posisi strategis sebagai aktor utama dalam proses pengambilan dan pengembangan kebijakan pendidikan. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai administrator yang mengelola kegiatan operasional, tetapi juga sebagai pemimpin transformasional yang mampu mengarahkan visi, membangun budaya organisasi, serta memobilisasi seluruh sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter (Mulyasa, 2013). Dalam perspektif kebijakan pendidikan, kepemimpinan sekolah mencakup kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan kebijakan yang kontekstual, serta memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Di UPT SMPN 22 Gresik, kepemimpinan sekolah menunjukkan kecenderungan yang demokratis dan partisipatif, di mana proses pengambilan keputusan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, kepala sekolah juga mengedepankan pendekatan humanis dalam kepemimpinannya, yang tercermin melalui komunikasi yang terbuka, perhatian terhadap kesejahteraan guru, serta penciptaan hubungan interpersonal yang harmonis (Lickona, 2013).

Pendekatan ini berimplikasi pada terciptanya iklim kerja yang kondusif, kolaboratif, dan mendukung implementasi kebijakan secara optimal.

Dalam kerangka pengembangan kebijakan penanaman nilai pendidikan Islam moderat, UPT SMPN 22 Gresik menerapkan pendekatan yang adaptif, inklusif, dan berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan. Keberagaman latar belakang agama peserta didik menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif. Proses perumusan kebijakan dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang terstruktur, transparan, dan partisipatif, dengan mengedepankan prinsip kesetaraan serta penghormatan terhadap hak-hak individu. Pendekatan ini sejalan dengan *mixed scanning theory* yang mengombinasikan analisis rasional dengan pertimbangan situasional dalam pengambilan keputusan (Etzioni, 1967), sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat ideal, tetapi juga realistis dan implementatif. Bentuk konkret dari kebijakan tersebut meliputi penyediaan layanan pendidikan keagamaan bagi siswa non-Muslim, penyesuaian kegiatan keagamaan agar tidak bersifat eksklusif, serta integrasi nilai-nilai moderasi dalam berbagai program sekolah. Selain itu, kebijakan juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung penanaman nilai-nilai moderasi secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dikembangkan tidak bersifat parsial, tetapi holistik dan terintegrasi dengan ekosistem pendidikan yang lebih luas.

Implementasi kebijakan penanaman nilai pendidikan Islam moderat di UPT SMPN 22 Gresik dilakukan secara komprehensif melalui integrasi dalam kurikulum, penguatan budaya sekolah, serta pembiasaan dalam interaksi sosial sehari-hari. Dalam aspek kurikulum, nilai-nilai moderasi beragama telah diintegrasikan dalam Kurikulum Merdeka, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAIBP), pendidikan keagamaan Nasrani, serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (Kemendikbud, 2022). Integrasi ini dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang dialogis, reflektif, dan kontekstual, sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep moderasi secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, budaya sekolah yang dikembangkan juga mencerminkan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan, seperti pelaksanaan kegiatan keagamaan yang berjalan berdampingan secara harmonis, pembiasaan sikap saling menghargai, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial lintas agama. Guru sebagai pelaksana kebijakan memiliki peran strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai tersebut melalui metode pembelajaran yang inklusif dan tidak diskriminatif, serta melalui keteladanan dalam sikap dan perilaku (Muhaimin, 2015).

Lebih lanjut, keberhasilan implementasi kebijakan ini juga didukung oleh penyediaan fasilitas yang adil, proporsional, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Sekolah memberikan ruang bagi setiap peserta didik untuk menjalankan ajaran agamanya secara bebas dan tanpa tekanan, serta menyediakan layanan pembelajaran keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak ditemukan praktik pemaksaan atribut keagamaan maupun tindakan diskriminatif dalam aktivitas sekolah, yang menunjukkan bahwa kebijakan yang dikembangkan telah diimplementasikan secara konsisten dan berorientasi pada prinsip keadilan. Kondisi ini mencerminkan penerapan konsep pendidikan multikultural yang menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, serta penghormatan terhadap keberagaman sebagai bagian integral dari proses pendidikan (Banks, 2016). Selain itu, lingkungan sekolah yang kondusif dan harmonis juga menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan dalam menciptakan budaya organisasi yang positif, adaptif, dan inklusif.

Selain aspek implementasi, peran kepemimpinan sekolah juga terlihat dalam proses evaluasi dan pengembangan kebijakan secara berkelanjutan. Kepala sekolah secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan penanaman nilai pendidikan Islam moderat, baik melalui supervisi akademik maupun

evaluasi kelembagaan. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan inovasi kebijakan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini, kepemimpinan yang reflektif dan adaptif menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program serta memastikan bahwa nilai-nilai moderasi tetap terinternalisasi secara konsisten dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Dengan demikian, kepemimpinan tidak hanya berperan pada tahap perumusan dan implementasi, tetapi juga dalam menjaga kualitas dan efektivitas kebijakan melalui proses evaluasi yang sistematis.

Secara keseluruhan, analisis terhadap peran kepemimpinan sekolah dalam mengembangkan kebijakan penanaman nilai pendidikan Islam moderat di UPT SMPN 22 Gresik menunjukkan bahwa kepemimpinan yang demokratis, partisipatif, humanis, dan transformatif memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Kepemimpinan yang efektif mampu mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam kebijakan, kurikulum, budaya sekolah, serta praktik pembelajaran secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat pada terbentuknya karakter peserta didik yang toleran, empatik, adil, serta mampu hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian tentang kepemimpinan pendidikan, khususnya dalam konteks pengembangan kebijakan berbasis nilai-nilai moderasi Islam, serta menjadi rujukan bagi sekolah lain dalam mengembangkan praktik pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pembentukan karakter di era globalisasi.

KESIMPULAN

Kepemimpinan sekolah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mengembangkan serta mengimplementasikan kebijakan penanaman nilai pendidikan Islam moderat di lingkungan sekolah. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya berfungsi secara administratif dalam mengelola lembaga pendidikan, tetapi juga berperan sebagai kekuatan utama dalam membangun budaya sekolah yang inklusif, toleran, demokratis, dan berkeadilan. Melalui gaya kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif, kepala sekolah mampu melibatkan seluruh warga sekolah, baik guru, tenaga kependidikan, maupun peserta didik dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan. Hal ini menjadikan kebijakan yang dihasilkan lebih kontekstual, responsif terhadap keberagaman, serta memiliki tingkat penerimaan dan keberlanjutan yang lebih tinggi dalam praktiknya. Kepemimpinan yang humanis dan transformatif juga berkontribusi dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif, harmonis, serta mendukung internalisasi nilai-nilai moderasi secara menyeluruh.

Selain itu, implementasi kebijakan penanaman nilai pendidikan Islam moderat dilakukan secara sistematis melalui integrasi dalam kurikulum, proses pembelajaran, serta pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Nilai-nilai seperti *tawassuth* (moderasi), *tawazun* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (keadilan) tidak hanya diajarkan secara konseptual, tetapi juga diinternalisasikan melalui praktik nyata dalam interaksi sosial antarwarga sekolah. Proses ini diperkuat melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang mendukung terbentuknya sikap saling menghargai, empati, serta kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Dengan demikian, keberhasilan penanaman nilai pendidikan Islam moderat sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan sekolah, kejelasan arah dan substansi kebijakan yang dirumuskan, serta konsistensi dan komitmen dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan, sinergi antara kepemimpinan yang visioner dan implementasi kebijakan yang terstruktur mampu menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus mendukung terbentuknya generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat yang plural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Asep. 2018. "Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 14(1).
- Alam, Masnur. 2017. "Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17(2).
- Azra, Azyumardi. 2019. *Moderasi Islam di Indonesia: Dari Ajaran ke Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Banks, James A. 2016. *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. New York: Routledge.
- Bahar, Muchlis. 2022. "Internalisasi Moderasi Beragama Perspektif Islam dalam Dunia Pendidikan." *Ijd-Demos*, 4(2).
- Etzioni, Amitai. 1967. "Mixed-Scanning: A Third Approach to Decision-Making." *Public Administration Review*.
- Hanim, Zaenab, Dian Septiana Sari, dan Rahmat Soe'oed. 2020. "Kebijakan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Guru." *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(1).
- Kemendikbud. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbud. 2022. *Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Khosiin, Achmad. 2021. "Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Pengambilan Keputusan, dan Budaya Organisasi terhadap Disiplin Kerja." *Chalim Journal of Teaching and Learning*, 1(1).
- Lickona, Thomas. 2013. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Maghfuri, Amin. 2019. "Peran Lembaga Pendidikan dalam Pengarusutamaan Islam Moderat sebagai Upaya Melawan Paham Radikal." *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2).
- Muhaimin. 2015. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mulyasa, E. 2013. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pratama, Frandy. 2020. "Kebijakan Kepemimpinan Perubahan Kepala Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(3).
- Putri, Oktia Anisa. 2022. "Aktualisasi Moderasi Beragama dalam Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Merdeka Belajar." *Jurnal At-Ta'dib*, 14(2).
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Saputra, Wempi, Rusdinal, dan Nurhizrah Gistituati. 2021. "Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5).
- Sodikin, Ahmad, dan Muhammad Anas Ma'arif. 2021. "Penerapan Nilai Islam Moderat dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 19(2).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zubaidi. 2022. *Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Menghadapi Tantangan Radikalisme*. Jember.
- Zuhri, Achmad Muhibin. 2022. *Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia*. Lamongan: Academia Publication.